

**PENERAPAN PENDIDIKAN HUTAN DAN LINGKUNGAN BAGI
SEKOLAH-SEKOLAH DI SEKITAR KAWASAN HUTAN**
(The Implementation of Environmental Education for Schools Surrounding
Forest Area)

**E.K.S. Harini Muntasib, Burhanuddin Masy'ud, Rachmad Hermawan,
S.B. Rushayati, Eva Rachmawati, Resti Meilani, Yun Yudiarti, Tri
Rahayuningsih**
Dep. Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan IPB

ABSTRAK

Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) dikembangkan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi degradasi lingkungan dengan mempersiapkan sumberdaya manusia berkualitas yang memiliki kemampuan untuk mengelola lingkungan dengan baik. Sebuah Model Pendidikan Hutan dan Lingkungan (PHL), sebagai bagian dari PLH yang dikembangkan oleh Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, telah dikembangkan sejak tahun 1995 dan telah disosialisasikan serta diujicobakan pada berbagai sekolah contoh di beberapa wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menerapkan Model Pelaksanaan Pendidikan Hutan dan Lingkungan untuk sekolah-sekolah di sekitar hutan, dan (2) Mengembangkan Model jaringan kemitraan antara pengelola kawasan hutan dengan sekolah-sekolah di sekitarnya. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, wawancara terpandu, pengamatan lapang, penyebaran kuesioner, Focus Group Discussion (FGD) dan lokakarya. Hasil menunjukkan bahwa pengetahuan, pemahaman, persepsi dan motivasi kepala sekolah, guru dan siswa serta dukungan orangtua, mempengaruhi penerapan PLH/PHL dan akhirnya mempengaruhi respon siswa; Model Jaringan Kemitraan Penerapan PLH yang dikembangkan adalah suatu bentuk konseptual yang menunjukkan hubungan kemitraan (partnership) atau hubungan kerjasama saling menguntungkan antar dua atau lebih pihak (sekolah, pemerintah, swasta dan masyarakat) untuk mencapai tujuan pembelajaran PLH; Peran Para-pihak (stakeholders) dalam implementasi PLH di sekolah sekitar hutan pada dasarnya dapat bersifat aktif maupun inaktif; Sekolah sebagai pusat dari jejaring kemitraan dalam penerapan PLH, dengan kunci penentu kapasitas kepemimpinan kepala sekolah dan guru, sebaiknya memiliki inisiatif atau prakarsa untuk membangun kemitraan; perguruan tinggi dan LSM berperan dalam memberikan pendampingan serta supporting bagi terbangunnya jejaring kemitraan tersebut.

Kata kunci : Hutan, lingkungan, pendidikan, kemitraan, model.

ABSTRACT

Environmental Education (EE) had been developed as an effort to overcome environmental degradation by preparing high quality human resources with ability to manage the environment wisely. A model of Forest and Environmental Education (FEE Model), as a part of EE developed by Faculty of Forestry Bogor Agricultural University, had been developed since 1995. The model had been socialized and pilot-tested at various sample schools in several areas. The research was aimed at (1) implementing the FEE Model for schools located around forest areas, and (2) developing a model of partnership network between forest area management and the surrounding schools. Data was collected through literature review, guided interview, field observation, questionnaire dissemination, FGD and workshop. The result showed that knowledge, understanding, perception and motivation of the principals, teachers, students, and support from parents

affecting the implementation of EE/FEE and ultimately affecting students' responses; Model of Partnership Network in EE/FEE Implementation being developed is a conceptual form showing partnership or mutually beneficial cooperative relation between two or more stakeholders (schools, governmental agencies, private agencies and community) in attaining the objectives of EE/FEE; stakeholders basically can play active or inactive role in EE/FEE implementation at schools surrounding forest area; School as the center of partnership network, with principals' and teachers' leadership capacity as determinant key, should have the initiative to build the partnership; higher education institution and NGO play the role in assisting and supporting the development of partnership network.

Keywords: Forest, environment, education, partnership, model.

PENDAHULUAN

Pelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan dapat dicapai apabila masyarakat mempunyai kepedulian yang tinggi, pengetahuan yang memadai, keterampilan menjaga dan mengelola serta mempunyai tanggung jawab terhadap hutan dan lingkungan. Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) dikembangkan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi degradasi lingkungan dengan mempersiapkan sumberdaya manusia berkualitas yang memiliki kemampuan untuk mengelola lingkungan dengan baik. Kementerian Lingkungan Hidup (2004) dalam kebijakannya mendefinisikan PLH sebagai upaya mengubah perilaku dan sikap yang dilakukan oleh berbagai pihak atau elemen masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai lingkungan dan isu permasalahan lingkungan yang pada akhirnya dapat menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian dan keselamatan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.

Pendidikan Hutan dan Lingkungan (PHL) merupakan bagian dari PLH yang dikembangkan oleh Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor dengan tujuan untuk membentuk kelompok masyarakat yang memiliki kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan kepedulian yang tinggi untuk ikut serta dalam usaha pelestarian hutan dan lingkungannya. Sebuah model pendidikan hutan dan lingkungan bagi sekolah di sekitar hutan telah dikembangkan sejak tahun 1995 untuk mencapai tujuan tersebut. Model tersebut sudah disosialisasikan dan

diujicobakan pada berbagai sekolah contoh di wilayah Kabupaten Bogor, Purwakarta, Sukabumi, Cianjur (Jawa Barat) dan Gundih (Jawa Tengah).

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menerapkan Model pelaksanaan Pendidikan Hutan dan Lingkungan untuk sekolah-sekolah di sekitar hutan, dan (2) Mengembangkan Model jaringan kemitraan antara pengelola kawasan hutan dengan sekolah-sekolah di sekitarnya.

METODE PENELITIAN

Lokasi

Penerapan Pendidikan Hutan dan Lingkungan dilaksanakan di 4 sekolah dasar contoh yang terletak di dekat kawasan hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Kabupaten Bogor dan Kawasan Hutan Pendidikan Gunung Walat, Kabupaten Sukabumi. Kriteria pemilihan sekolah contoh adalah 1) lokasi sekolah dekat dengan kawasan hutan; 2) ada interaksi warga sekolah dengan kawasan hutan; 3) sekolah negeri (pemerintah); 4) pernah mendapatkan kegiatan PHL, baik untuk guru, siswa maupun keduanya. Sekolah yang dipilih adalah SDN Gunung Bunder 4 dan SDN Gunung Picung di Kabupaten Bogor serta SDN Lembur Sawah dan SDN Bojong Waru di kabupaten Sukabumi. Selain itu juga dievaluasi sekolah-sekolah yang pernah mendapatkan PHL secara intensif dari Tim Fakultas Kehutanan dan juga pada Dinas-Dinas terkait dengan PLH.

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan untuk penelitian ini adalah panduan wawancara untuk Dinas-Dinas terkait, Panduan untuk FGD dan Panduan wawancara untuk kepala sekolah dan kuisisioner untuk siswa, guru dan kepala sekolah. Alat yang digunakan adalah kamera, alat tulis, alat perekam.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui kegiatan: 1) studi pustaka, untuk mendapatkan gambaran mengenai model PHL yang telah dikembangkan, sistem pembelajaran di sekolah pada saat ini serta kebijakan yang berlaku terkait PLH; 2) wawancara terpandu terhadap Dinas-Dinas terkait PLH (Pendidikan, Lingkungan Hidup,

Kehutanan & Pertanian) tentang kebijakan daerah terkait PLH; kepala sekolah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai program PHL yang telah, sedang dan akan dilaksanakan, persepsi dan motivasi terhadap kegiatan PHL, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan PHL, serta harapan terkait pengembangan kegiatan PHL; 3) penyebaran kuisioner kepada para guru untuk mendapatkan gambaran mengenai penerapan PHL yang dilakukan oleh guru di sekolah, serta penyebaran kuisioner kepada siswa untuk mendapatkan gambaran mengenai pengetahuan dan pemahaman siswa mengenai hutan dan lingkungan; 4) Focus group discussion (FGD) untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh sekolah (guru dan kepala sekolah) dalam melaksanakan PHL; 5) pengamatan lapang untuk memperoleh informasi tentang sumberdaya biologis, fisik dan kondisi sosial-ekonomi-budaya masyarakat di sekolah dan lingkungan sekitarnya, serta; 6) lokakarya untuk memantapkan jaringan kemitraan dalam penerapan PHL/PLH di sekolah sekitar kawasan hutan.

Analisa Data

Data dan informasi yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif dan diterapkan berdasarkan Model yang telah dikembangkan oleh Fakultas kehutanan IPB sebagai berikut:

Model yang dikembangkan Fakultas Kehutanan IPB untuk penerapan PHL pada sekolah-sekolah di sekitar kawasan hutan memasukkan lima faktor kunci, yaitu 1) kepala sekolah sebagai pengambil keputusan dan penentu kebijakan; 2) guru berperan sebagai pengajar, fasilitator, mediator atau pihak yang berperan menyampaikan materi mengenai hutan dan lingkungan kepada siswa; 3) siswa sebagai subyek dan sekaligus obyek dalam kegiatan PHL; 4) Orang tua siswa, sebagai anggota masyarakat yang terkait langsung dengan sekolah, berperan mendukung siswa dalam memahami dan menerapkan materi hutan dan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, serta; 5) sarana pendidikan. Kelima faktor kunci tersebut sebagai input dalam proses pembelajaran PHL yang mempengaruhi output berupa respon siswa terkait pengetahuan dan pemahaman, sikap, serta keterampilan dan perilaku tentang hutan dan lingkungan. Input yang positif terhadap proses pembelajaran PHL di sekolah diharapkan akan

menghasilkan respon pengetahuan dan pemahaman, sikap, serta keterampilan dan perilaku terkait hutan dan lingkungan yang positif dari siswa, sehingga tujuan penerapan PHL di sekolah dapat tercapai.

Model PHL tersebut juga menguraikan perlunya mitra untuk mengatasi berbagai keterbatasan sekolah dalam pengembangan dan penerapan PHL. Kontribusi mitra dapat berupa kontribusi fisik seperti pengadaan sarana pendidikan, maupun kontribusi non-fisik yang terkait dengan penguatan kapasitas kepala sekolah dan guru dalam penerapan PHL di sekolah. Selain itu dilakukan pula analisis untuk mendapatkan gambaran mengenai kebijakan daerah serta penerapan PHL di sekolah-sekolah tersebut dalam kerangka model PHL yang telah dikembangkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pendidikan Hutan dan Lingkungan di Sekolah

Zelezny (1999) dalam Darner (2009) menyatakan bahwa PLH melalui jalur pendidikan formal di sekolah secara umum lebih efektif dibandingkan PLH melalui jalur pendidikan informal. Pada keempat sekolah, PLH/PHL diterapkan setelah adanya SK Gubernur Jawa Barat mengenai Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PLH, penerapannya masih bersifat integratif/disisipkan pada mata ajaran yang ada. Selain itu, PLH/PHL diterapkan pula dalam kegiatan ekstrakurikuler Pramuka. Buku pedoman maupun kurikulum PLH/PHL belum ada/dikembangkan di sekolah, dan guru-guru dibebaskan menyusun materi PLH/PHL sendiri ataupun dalam kegiatan ekstrakurikuler Pramuka. Respon siswa terhadap proses pembelajaran PHL yang dilihat dari pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku terhadap hutan dan lingkungan, menunjukkan bahwa secara umum respon siswa dari sekolah contoh di Kabupaten Bogor lebih baik dibandingkan respon siswa dari sekolah contoh di Kabupaten Sukabumi. Respon siswa terbaik teramati pada siswa dari SDN Gunung Bunder 04 Kabupaten Bogor.

Faktor Kunci dalam Penerapan PHL di Sekolah Contoh

Pengamatan faktor kunci dalam kerangka model PHL yang dikembangkan Fakultas Kehutanan IPB di keempat sekolah contoh tersebut adalah :

1. Kepala Sekolah

Kepala sekolah pada 4 sekolah contoh menyatakan dukungan terhadap penerapan PHL di sekolah. Namun perbedaan mewujudkan dukungan tersebut dalam kebijakan dan keputusan yang diambil kepala sekolah mengenai penerapan PHL di sekolahnya. Perbedaan yang menonjol adalah kebijakan kepala sekolah SDN Gunung Bunder 04 Kabupaten Bogor yang mengizinkan diadakannya kegiatan studi lapang pengenalan keanerakaragaman hayati kepada siswa. Hal itu mendorong guru secara kreatif menggunakan hutan di dekat sekolahnya sebagai sumber dan media pembelajaran yang memberikan pengalaman langsung kepada siswa untuk berinteraksi dengan alam dan mengasah kepekaan siswa terhadap lingkungan

Persepsi dan motivasi serta pengetahuan dan pemahaman Kepala sekolah terhadap PHL pada dua sekolah contoh di Kabupaten Bogor relatif lebih baik dibandingkan dua sekolah contoh lain di Kabupaten Sukabumi. Kepala sekolah contoh di Kabupaten Bogor menerima PHL tidak hanya sebagai tugas, namun juga sebagai sesuatu yang penting dan memberikan pengaruh positif kepada siswanya. Dua sekolah contoh di Kabupaten Sukabumi, persepsi dan motivasi maupun pengetahuan dan pemahaman kepala sekolah mengenai PHL masih belum terbentuk dengan baik. PHL masih dipandang sebagai tugas dan beban tambahan bagi sekolah . Kepala sekolah masih sangat bergantung pada bantuan dari pihak luar dan belum mengambil inisiatif sendiri untuk pengembangan PHL di sekolahnya.

2. Guru

Guru pada sekolah contoh di Kabupaten Bogor memiliki persepsi yang baik mengenai PH sebagai kebutuhan yang memberikan pengaruh positif terhadap siswa, sedangkan guru pada sekolah contoh di Kabupaten Sukabumi masih berpandangan bahwa PHL adalah tugas, dan penerapannya sebatas

memenuhi kewajiban tugas. Guru dari sekolah contoh di Kabupaten Bogor ada yang pernah mendapatkan pelatihan mengenai PHL, meskipun transfer pengetahuan tidak terjadi secara optimal antar guru. Penggunaan metode pengajaran oleh guru dari sekolah contoh di Kabupaten Bogor relatif sama, kecuali pada SDN Gunung Bunder 04 yang menggunakan tambahan metode observasi di lapangan dan demonstrasi. Hal tersebut karena inisiatif guru SDN Gunung Bunder 04 yang memiliki pengalaman dalam Saka Wana Bakti (organisasi pramuka dengan fokus kegiatan kehutanan). Hal itu sesuai pendapat Plevyak, et al. (2001) dalam Darner (2009) yang mengatakan bahwa jika para calon guru dilatih untuk mengimplementasikan PLH, maka saat menjadi guru mereka akan mengimplementasikan PLH lebih sering dan dengan lebih percaya diri dibandingkan para guru yang sebelumnya tidak mendapatkan pelatihan.

Guru sekolah contoh di Kabupaten Sukabumi belum pernah mendapatkan pelatihan PHL, metode pengajarannya ceramah, diskusi, penugasan, menggambar, bercerita dan bernyanyi. Kreativitas guru memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah sebagai media pengajaran lebih rendah dibandingkan guru dari sekolah contoh di Kabupaten Bogor.

Perluasan pengetahuan, pemahaman serta penguasaan keterampilan guru dalam menerapkan PLH diperlukan untuk menjamin berkembangnya penerapan PLH di sekolah, sehingga PLH tidak hanya meningkatkan pengetahuan namun juga mengubah perilaku siswa menjadi lebih ramah lingkungan. Materi dan metode pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup yang selama ini digunakan secara umum, dirasakan belum memadai dan tidak aplikatif, sehingga pemahaman kelompok sasaran mengenai pelestarian lingkungan hidup menjadi tidak utuh dan kurang mendukung penyelesaian permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi di daerah masing-masing. Keterbatasan penguasaan mengenai metode pengajaran yang dapat digunakan dalam penerapan PLH oleh guru dirasakan sebagai hambatan dalam mengajarkan PLH kepada siswa.

3. Siswa

Pengetahuan dan pemahaman mengenai hutan dan lingkungan dari siswa sekolah contoh di Kabupaten Bogor lebih baik dibandingkan siswa di sekolah contoh di Kabupaten Sukabumi, dengan pengetahuan dan pemahaman terbaik dimiliki oleh siswa SDN Gunung Bunder 04. Selain dipengaruhi oleh guru, penyerapan pengetahuan dan pemahaman siswa dipengaruhi oleh minat dan motivasi belajar yang ditunjukkan oleh respon dan keaktifan siswa dalam menerima materi.

Siswa dari sekolah contoh di Kabupaten Bogor memberikan respon yang lebih baik dan lebih aktif dalam menyerap materi yang diberikan terutama melalui permainan, juga aktif menjawab maupun bertanya dalam diskusi di kelas. Motivasinya lebih bersifat internal. Siswa dari sekolah contoh di Kabupaten Sukabumi cenderung pasif dalam diskusi dan baru menjadi aktif setelah ada hadiah yang ditawarkan. Motivasi siswa dari sekolah contoh di Kabupaten Sukabumi untuk belajar dipengaruhi oleh faktor eksternal reward/hadiah yang diberikan.

Meskipun masih harus dikaji lebih dalam, namun pengalaman interaksi langsung dengan alam memberikan nilai lebih dalam pengajaran PLH oleh guru kepada siswa di SDN Gunung Bunder 04, karena siswa sebagai peserta dituntut lebih aktif dalam proses belajar. Hal itu sesuai dengan pendapat Hewitt (1977); Siemer dan Knuth (2001); dan Zelezny (1999); dalam Darner (2009) yang menyatakan bahwa keterlibatan siswa sebagai peserta aktif dalam proses belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan PLH dalam mengubah perilaku menjadi lebih ramah lingkungan. Darner (2009) juga menyatakan bahwa orang yang memiliki sikap ramah lingkungan umumnya memiliki pengalaman masa kecil pada daerah alamiah yang relatif tidak terjamah dan belum dikembangkan (Chawla, 1998; Ewert, Place dan Sibthorp, 2005; Palmer, 1993; Palmer dan Suggate, 1996; Tanner, 1980); dipengaruhi oleh keluarga, rekan, atau teladan yang memiliki kepedulian terhadap alam (Palmer, 1993; Tanner, 1980); menyaksikan perusakan daerah alamiah yang dicintai atau memiliki pengalaman negatif serupa yang melibatkan perusakan lingkungan (Ewert et al., 2005; Marshall, Picou dan

Bevc, 2005; Palmer, 1993; Tanner, 1980) dan ikut serta dalam PLH formal (Palmer, 1993).

4. Orangtua

Orangtua siswa sekolah contoh di Kabupaten Bogor lebih memiliki kepedulian terhadap pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun kebersihan lingkungan rumah dibandingkan orang tua dari siswa sekolah contoh di Kabupaten Sukabumi. Kepedulian itu ditunjukkan dengan kontribusinya membantu menyelesaikan permasalahan sekolah dan memelihara kebersihan lingkungan rumah serta memelihara berbagai jenis tanaman di rumahnya. Siswa sekolah contoh Kabupaten Bogor mendapatkan teladan dari orangtua dalam memelihara lingkungan rumahnya.

5. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan pada keempat sekolah contoh terbatas, terutama buku/modul PHL serta fasilitas penunjang dan alat peraga yang dapat digunakan dalam pengajaran PHL di sekolah. Hal itu menjadi kendala bagi guru sekolah contoh dalam melaksanakan PLH. Dari aspek fisik bangunan, SDN Gunung Bunder 04 paling sederhana dan sangat terbatas (tidak memiliki lahan sisa) dibandingkan tiga sekolah lainnya, sedangkan SDN Gunung Picung 05 memiliki fisik bangunan terbaik. Namun kondisi yang sangat terbatas tersebut tidak menghalangi guru SDN Gunung Bunder 04 untuk menerapkan PHL, bahkan kondisi tersebut mendorong guru kreatif memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah dan kawasan hutan di dekat sekolah dalam pembelajaran PHL di sekolahnya. Meskipun ada keterbatasan sarana pendidikan, namun PHL yang diajarkan oleh guru pada kedua sekolah contoh di Kabupaten Bogor dapat memperluas wawasan para siswanya dan menanamkan perilaku ramah lingkungan (dari kondisi lingkungan sekolah yang rapi serta perilaku siswa saat pelaksanaan kegiatan). Namun di kedua sekolah contoh Kabupaten Sukabumi belum mendorong perubahan perilaku siswa untuk lebih ramah lingkungan.

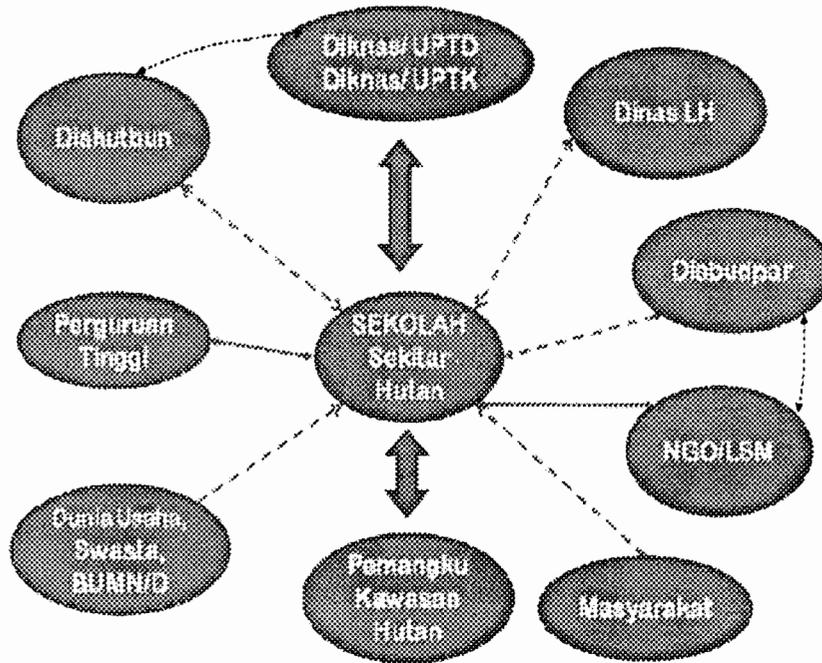
Penerapan Model Jaringan Kemitraan PHL di Sekolah

Model Jaringan Kemitraan Pendidikan Hutan dan Lingkungan di Sekolah

Untuk mengembangkan penerapan PLH di sekolah sekitar hutan diperlukan dukungan berbagai pihak, agar terbangun suatu jaringan kemitraan antara pihak sekolah dengan para-pihak (stakeholders) khususnya dengan unit pengelola (pemangku) kawasan hutan tersebut. Jejaring kemitraan menjadi ciri penting dari pengembangan suatu masyarakat ataupun organisasi modern (swasta maupun publik). Sekolah sebagai unit organisasi modern dituntut mengembangkan kemitraan. Kemitraan harus dibangun di atas tiga pilar, yakni (a) Kepercayaan (trust), (b) nama baik atau reputasi (reputation), dan (c) ketergantungan timbal balik (interdependensi). Model Jaringan Kemitraan Penerapan PLH adalah "suatu bentuk konseptual yang menunjukkan hubungan kemitraan (partnership) atau hubungan kerjasama saling menguntungkan antar dua atau lebih pihak (sekolah, pemerintah, swasta dan masyarakat) untuk mencapai tujuan pembelajaran PLH, yaitu mewujudkan masyarakat umumnya dan peserta didik khususnya agar memiliki pengetahuan, sikap, keterampilan dan perilaku, kepedulian serta tanggungjawab terhadap kelestarian hutan dan lingkungan.

Pola Hubungan Antar Para-Pihak

Pola hubungan antar para-pihak dalam pengembangan dan penerapan PLH di sekolah sekitar hutan dapat digambarkan sebagaimana tertera pada Gambar 1. Pola hubungan tersebut pada dasarnya diarahkan pada dukungan kepada manajemen sekolah agar mengoptimalkan peran sekolah dalam menunaikan tugas dan tanggungjawab penyelenggaraan pendidikannya. Pola hubungan tersebut dapat bersifat instruktif, koordinatif, konsultatif dan fasilitatif.



Gambar 1. Pola hubungan antar para-pihak dalam pengembangan dan penerapan PLH di sekolah sekitar hutan.

Kedudukan dan Peran Para-pihak

Para-pihak (stakeholders) dalam implementasi PLH di sekolah sekitar hutan pada dasarnya dapat berperan secara langsung/ bersifat aktif maupun yang berperan secara tidak langsung/ bersifat inaktif. Upaya penerapan PLH bagi sekolah di sekitar hutan didasarkan atas prinsip dasar sukarela dan panggilan tanggungjawab sosial. Mitchell et al. (1997) menyebutkan paling tidak ada empat bentuk tingkatan partisipasi dalam kerangka jejaring kemitraan yaitu tipe kerja sama sebagai Kontributor (support atau sharing), Operasional (working atau sharing) dan Konsultatif (Advisor). Dalam rangka Kemitraan penerapan PLH di sekolah, maka sekolah berkedudukan sebagai pengambil keputusan dan pelaksana utama (operator), sehingga dapat dirumuskan kedudukan dan peran dari masing-masing pihak.

Cara Membangun Kesepakatan Kerjasama dan Kemitraan

Untuk membangun kesepakatan kerjasama dan kemitraan antar para pihak terkait dengan implementasi PLH, perlu diperhatikan faktor-faktor pendukung yang terkait dengan keberhasilan implementasi PLH tersebut. Pada tataran operasional

penerapan PLH di sekolah, diantaranya adalah: (1) Diknas/Dinas - UPTD Pendidikan terkait dengan tugas dan tanggung-jawabnya, (2) Leadership (kepemimpinan) Kepala Sekolah terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan sekolah, baik dalam fungsinya sebagai manager, supervisor, motivator, dan kontroler, (3) Guru terutama terkait dengan kapasitas profesionalisme, keteladanan, kapasitas menterjemahkan visi dan misi sekolah, serta obsesi, cita-cita dan harapannya terhadap kesuksesan penyelenggaraan pendidikan, (4) Ketersediaan sarana-prasarana pendidikan, (5) Dukungan kemitraan dari para pihak baik berupa dana, tenaga dan pemikiran, serta media pengajaran.

Sekolah sebagai pusat dari jejaring kemitraan dalam penerapan PLH, maka kunci penentu adalah adanya kapasitas kepemimpinan kepala sekolah dan guru. Inisiatif atau prakarsa membangun kemitraan sebaiknya tumbuh dari pihak sekolah disamping peran dan fungsi perguruan tinggi dan LSM dalam memberikan pendampingan serta supporting bagi terbangunnya jejaring kemitraan tersebut.

KESIMPULAN

1. Penerapan Pendidikan Hutan dan Lingkungan pada sekolah-sekolah contoh Input sesuai dengan Faktor-faktor kunci yang dikembangkan oleh Tim Fakultas Kehutanan IPB, sedangkan Outputnya tergantung dari pengetahuan, pemahaman, persepsi dan motivasinya (Kepala sekolah, Guru, Siswa dan Orangtua siswa)
2. Model Jaringan Kemitraan Penerapan PLH adalah "suatu bentuk konseptual yang menunjukkan hubungan kemitraan (partnership) atau hubungan kerjasama saling menguntungkan antar dua atau lebih pihak (sekolah, pemerintah, swasta dan masyarakat) untuk mencapai tujuan pembelajaran PLH yaitu mewujudkan masyarakat umumnya dan peserta didik khususnya agar memiliki pengetahuan, sikap, keterampilan dan perilaku, kepedulian serta tanggungjawab terhadap kelestarian hutan dan lingkungan

3. Para pihak (stakeholders) dalam implementasi PLH di sekolah sekitar hutan pada dasarnya dapat berperan secara langsung/ bersifat aktif maupun yang berperan secara tidak langsung/ bersifat inaktif
4. Kemitraan penerapan PLH di sekolah, maka sekolah berkedudukan sebagai pengambil keputusan dan pelaksana utama (operator), sehingga dapat dirumuskan kedudukan dan peran dari masing-masing pihak. Sekolah sebagai pusat dari jejaring kemitraan dalam penerapan PLH, maka kunci penentu adalah adanya kapasitas kepemimpinan kepala sekolah dan guru.
5. Inisiatif atau prakarsa membangun kemitraan sebaiknya tumbuh dari pihak sekolah disamping peran dan fungsi perguruan tinggi dan LSM dalam memberikan pendampingan serta supporting bagi terbangunnya jejaring kemitraan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Darner, R. 2009. Self-Determination Theory as a Guide to Fostering Environmental Motivation. *The Journal of Environmental Education*, winter 2009, Vol.40 No.2. : Heldref Publications. Madison. <http://www.proquest.com/pqdweb> [18 Juni 2009].
- Kementerian Lingkungan Hidup. 2004. *Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup*. Kementerian Lingkungan Hidup. Jakarta.
- Mitchell B, B Setiawan, dan DH Rahmi. 1997. *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.